

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR DESA: *SCOPING REVIEW***

(Skripsi)

Oleh

**Refiyana
NPM. 1716041011**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

ABSTRAK

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA: *SCOPING REVIEW*

Oleh

REFIYANA

Partisipasi masyarakat adalah bentuk keterlibatan anggota masyarakat dalam seluruh pembangunan yang meliputi kegiatan dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program pembangunan. Keikutsertaan masyarakat dalam bentuk partisipasi merupakan penunjang keberhasilan program yang di berikan oleh pemerintah. Pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia, penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memetakan rumusan masalah yang sudah tersedia terkait partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur desa melalui *scoping review*. Penelitian ini menggunakan metode *scoping review* yang mengikuti *framework* menurut Levac, Colquhoun, and O'Brien dalam (Tricco *et al*, 2016) yang terdiri dari mengidentifikasi pertanyaan *review*, mengidentifikasi studi yang relevan, menyeleksi studi yang relevan, memetakan data, mendiskusikan, menyimpulkan dan melaporkan hasil *review*. Menampilkan alur pencarian studi penelitian menggunakan PRISMA *flowchart*. Hasil dari *review* ini menunjukkan bahwa terdapat 20 artikel yang didapatkan dari proses seleksi studi. Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat sangat didominasi menggunakan teori menurut Cohen dan Uphoff dengan tahap perencanaan dan tahap pelaksanaan sangat mendominasi dalam proses pembangunan, faktor kesadaran masyarakat sangat berpengaruh dalam pelaksanaan tahapan pembangunan infrastruktur desa mulai dari perencanaan sampai evaluasi yang berpengaruh terhadap keberhasilan pembangunan. Tentunya hal ini perlunya memaksimalkan peran pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dengan memberikan pemahaman, motivasi juga harus lebih mengedepankan aspirasi masyarakat dalam kepentingan pembangunan.

Kata Kunci: Partisipasi Masyarakat, Pembangunan, Infrastruktur Desa.

ABSTRACT

COMMUNITY PARTICIPATION IN VILLAGE INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT: *SCOPING REVIEW*

By

REFIYANA

Community participation is a form of involvement of community members in all development which includes activities in planning, implementing and evaluating development programs. Community participation in the form of participation is a supporter of the success of the program provided by the government. Village development aims to improve the welfare of rural communities and the quality of human life, reduce poverty through the fulfillment of basic needs, development of village facilities and infrastructure, development of local economic potential, and sustainable use of natural resources and the environment. The purpose of this study is to map the existing problem formulations related to community participation in village infrastructure development through scoping reviews. This study uses a scoping review method that follows the framework according to Levac, Colquhoun, and O'Brien in (Tricco et al, 2016) which consists of identifying review questions, identify relevant studies, selecting relevant studies, mapping data, discussing, concluding and report the results of the review. Displays the research study search flow using the PRISMA flowchart. The results of this review show that there are 20 articles obtained from the study selection process. The forms of community participation are heavily dominated by theory according to Cohen and Uphoff with the planning and implementation stages dominating in the development process, community awareness factor is very influential in the implementation of village infrastructure development stages starting from planning to evaluation that affect the success of development. Of course this is the need to maximize the role of the village government in increasing community participation by providing understanding, motivation must also prioritize community aspirations in the interests of development.

Keywords: Community Participation, Development, Village Infrastructure.

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR DESA: *SCOPING REVIEW***

Oleh

REFIYANA

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA ILMU ADMINISTRASI NEGARA

Pada

Jurusan Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Lampung



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

Judul Skripsi : **PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA:
SCOPING REVIEW**

Nama Mahasiswa : **Refiyana**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1716041011**

Jurusan : **Ilmu Administrasi Negara**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**




Nana Mulyana, S.IP., M.Si.
NIP. 19710615 200501 1 003


Ita Pranamita, S.Sos., M.A.
NIP. 19840630 201504 2 002

2. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara,


Meiliyana, S.IP., M.A.
NIP. 19740520 200112 2 002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Nana Mulyana, S.IP., M.Si.



Sekretaris : Ita Prihantika, S.Sos., M.A.



Penguji Utama : Simon Sumanjoyo H, S.A.N., M.PA.



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dra. Ita Nurhaida, M.Si.
NIP. 19610807 198703 2 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 22 Juni 2022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Komisi Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di tulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Bandar Lampung, 22 Juni 2022

Pernyataan,


Refiyana

NPM. 1716041011

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Refiyana, lahir di Margakaya pada tanggal 26 Maret 1999, merupakan puteri dari pasangan Bapak Haidir dan Ibu Roni Yunita. Penulis merupakan anak kelima dari lima bersaudara, dengan Reni Yunanda, Dina Riana, Maya Sofa dan M. Ropik. Penulis berasal dari Pekon Margakaya, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung. Penulis mengawali pendidikan formal pada pendidikan sekolah dasar di SD Negeri 1 Waluyojati dari tahun 2005-2011. Kemudian melanjutkan pendidikan sekolah menengah pertama di SMP Negeri 1 Pringsewu dari tahun 2011-2014, serta pendidikan sekolah menengah atas di SMA Negeri 1 Pringsewu dari tahun 2014-2017.

Pada tahun 2017 penulis terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN). Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif pada organisasi kampus yaitu Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas (BEM U) sebagai anggota Pergerakan dan Pemberdayaan Perempuan (PPW), Anggota Himpunan Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara (HIMAGARA). Pada tahun 2020 penulis melaksanakan kuliah kerja nyata (KKN) di Desa Selorejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur selama 40 hari serta mengikuti kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung.

MOTTO

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

(QS. Al-Insyirah: 5-6)

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(QS. Al-Baqarah: 286)

“Cukuplah Allah menjadi penolong bagi kami dan dia sebaik-baik pelindung”

(QS. Ali-Imran: 173)

“Yakinlah, ada sesuatu yang menantimu setelah sekian banyak kesabaran (yang kau jalani), yang akan membuatmu terpana hingga kau lupa betapa pedihnya rasa sakit”

(Ali bin Abi Thalib)

“Jangan membandingkan diri sendiri dengan orang lain, Karena setiap diri memiliki bahagia dan ujiannya masing-masing, Semua ada waktunya”

(Refiyana)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Dengan mengucap rasa syukur kepada Allah SWT
atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya.*

*Dengan segala ketulusan dan kerendahan hati,
Kupersembahkan skripsi ini,
Untuk orang-orang yang kusayangi dan menyayangiku:*

*Ayah dan Bundaku tercinta,
Terimakasih atas ketulusan hati yang selalu mencintai, menyayangi, mengasihi,
mendoakan, memberi dukungan, pengorbanan yang tiada habisnya dan menjadi
penyemangatku sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.*

*Kakak-kakakku tersayang,
Yang selalu memberikan semangat, dukungan dan mendoakan umtukku.*

*Untuk keluarga besarku, sahabat-sahabatku dan juga teman-teman
seperjuangan yang selalu memberikan dukungan dan motivasi dalam mencapai
keberhasilanku.*

Para pendidik tanpa tanda jasa

*Almamater tercinta,
UNIVERSITAS LAMPUNG*

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kepada Allah SWT, atas berkat rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “***PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA: SCOPING REVIEW***” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Administrasi Negara (S.A.N) pada jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Lampung.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna karena segala keterbatasan yang ada dan setiap kesalahan yang ada pada penulis dapat dijadikan sebagai proses pembelajaran bagi penulis dan pembaca kedepannya untuk lebih baik lagi. Saran serta kritik yang membangun sangat penulis harapkan untuk perbaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membaca, Aamiin.

Bandar Lampung, 22 Juni 2022
Penulis

Refiyana
1716041011

SANWACANA

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur penulis ucapkan atas limpahan berkah, rahmat dan hidayah yang diberikan oleh Allah SWT serta berkat doa dan restu dari orang tua tercinta sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul ***“Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Infrastruktur Desa: Scoping Review”*** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Administrasi Negara (SAN) pada Jurusan Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam skripsi ini karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki sehingga skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya dukungan berupa pengarahan, bimbingan, dan kerjasama semua pihak yang telah turut membantu dalam proses menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu, dalam kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Nana Mulyana S.IP., M.Si. selaku dosen pembimbing utama yang sudah bersedia meluangkan waktu, pikiran, bimbingan, pengarahan, saran dan masukan dalam penulisan skripsi ini. Semoga segala keikhlasan dan ketulusan Pak Nana dalam membimbing saya selama ini membawa keberkahan.
2. Ibu Ita Prihantika, S.Sos., M.A. selaku dosen pembimbing kedua dan selaku sekretaris jurusan Ilmu Administrasi Negara yang sudah bersedia meluangkan waktu, pikiran, bimbingan, pengarahan, saran dan masukan serta kesabaran yang diberikan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga Bu Ita dan keluarga selalu diberikan kemudahan dan kelancaran dalam segala hal.
3. Bapak Simon Sumanjoyo Hutagalung. S.A.N., M.PA. selaku dosen pembahas yang telah bersedia meluangkan waktu, bimbingan, pengarahan, saran dan masukan kepada penulis terkait penyusunan skripsi. Semoga kesehatan dan rezeki selalu dilimpahkan kepada bapak dan keluarga.

4. Bapak Dr. Bambang Utoyo, S, M.Si. selaku dosen Pembimbing Akademik (PA) yang senantiasa memberikan pengarahan dan masukan serta motivasi selama masa perkuliahan.
5. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
6. Ibu Meiliyana S.IP., M.A. selaku ketua Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
7. Dosen-dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Lampung. Pak Yulianto, Pak Dedy, Pak Noverman, Pak Syamsul, Pak Eko, Pak Apandi, Pak Dodi, Ibu Intan, Ibu Novita, Ibu Dian, Ibu Rahayu, Ibu Devi, Ibu Dewie, Ibu Indri, Ibu Ani, Ibu Vina, Ibu Selvi dan Ibu Anisa. Terimakasih atas semua ilmu yang bapak/ibu berikan kepada penulis, amal kalian tak akan pernah putus hingga akhir zaman. Semoga apa yang telah penulis peroleh selama masa perkuliahan menjadi bekal yang akan dibawa guna kehidupan penulis kedepannya. Aamiin
8. Mba Wulan selaku staff Jurusan Ilmu Administrasi Negara yang baik dan sabar saat memberikan pelayanan administrasi bagi penulis dan mahasiswa di jurusan.
9. Pihak-pihak yang telah menerbitkan artikel-artikel yang penulis gunakan untuk mengumpulkan data dan informasi dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Seluruh guru-guru penulis mulai dari SD hingga SMA, terima kasih banyak atas dedikasi dan arahan selama ini, sehingga penulis dapat melanjutkan pendidikan sampai di bangku perkuliahan, semoga Bapak/Ibu guru dapat terus menjadi guru yang memotivasi para muridnya untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi lagi serta selalu diberikan kemudahan atas segala sesuatunya.
11. Ayah dan Bundaku yang sangat penulis cintai dan hormati, terima kasih atas segala sesuatu yang kalian berikan kepada penulis. Doa, dukungan, nasihat, yang tiada henti. Terima kasih atas kasih sayang yang terus kalian berikan sejak penulis dilahirkan sampai saat ini dan juga seterusnya. Tiada balasan yang dapat menggantikan segalanya terkecuali Jannah untuk kalian.
12. Kakak-kakakku (Anyang Reni, Kiyai Ria, Daying Maya & Anyang Ropik), kakak-kakak iparku (Uda Heri, Kak Agung, Abang Hedi & Penata) serta keponakan-

keponakanku yang uncu sayangi (Abang Rizki, Ayuk Naila, Kakak Raisya, Uni Arsyi, Anyang Nathan, Mba Ayra, Uda Azriel dan Adek Izam). Terima kasih atas dukungan, semangat dan kasih sayang yang diberikan kepadaku selama ini. Terima kasih sudah memberikan kepercayaan dan selalu mendukung pilihan yang telah penulis tetapkan. Terima kasih atas doa dan telah menjadi sosok yang mendampingi dan menguatkan penulis selama ini. Aku menyayangi kalian.

13. Sepupuku (Chela Mitha Yance dan Nisa IR) terimakasih sudah mendukung, menyemangati, tempat curhat, berkeluh kesah, menemani dalam suka duka, teman bermain, teman makan, teman nongki. Loveyou gaes.
14. Teman-teman tempat berbagi lika-liku kisah perjalanan perkuliahan, teman satu kosan sejak maba, teman PKL ku: Indah Mustika Rani, Sitti Ulfa Khaliza dan Fatimah Sepni. Terima kasih sudah menjadi teman hidup penulis selama di perkuliahan ini, terima kasih atas *support* berlimpah yang diberikan ketika penulis berada pada masa sulit, sehingga penulis pada akhirnya bisa menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih juga atas segala tawa dan canda yang kalian berikan selama ini, Semoga kita bisa bareng-bareng terus ya, dan semua mimpi-mimpi kita bisa tercapai suatu saat nanti. *I love you and see you guys.*
15. *Friendship* geng *sisterhood* yang sudah menemani di dunia perkuliahan: Oktivia A, Aling Kibo, Anisa Cu, Sintia, Indah P, Ema Tisel, Marlina P. Terima kasih sudah menemani, mendukung dan saling berbagi selama perkuliahan ini.
16. Keluarga besar Himpunan Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara (HIMAGARA), terima kasih sudah memberikan pengalaman terbaik dan tidak terlupakan bagi penulis selama masa perkuliahan.
17. Teman-teman satu angkatan Administrasi Negara Unila (2017) Angkasa, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih telah menjadi teman berjuang pada masa perkuliahan dari awal hingga saat ini kita memasuki semester terakhir. Semoga segala urusan kalian akan selalu dimudahkan.
18. Teman-teman KKN Desa Selorejo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur: Vemi, Tika, Yani, Rizki, Eko dan Kevin. Terima kasih atas 40 hari yang

penuh makna. Banyak pengalaman dan kebersamaan yang tidak bisa kita ulangi lagi. Semoga tali silaturahmi kita selalu terjaga. Aamiin.

19. Semua pihak yang membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas bantuannya. Semoga Allah SWT selalu memberikan balasan yang lebih besar untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Hanya ucapan terima kasih dan doa yang bisa penulis berikan.

Akhir kata segala kebaikan dan bantuan yang diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Allah SWT dan penulis meminta maaf apabila terdapat kesalahan di dalam skripsi ini, karena peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Sedikit harapan peneliti, semoga karya ilmiah ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua.

Bandar Lampung, 22 Juni 2022
Penulis

Refiyana
1716041011

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
II. TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Tinjauan Tentang Partisipasi Masyarakat	10
2.1.1 Konsep Partisipasi Masyarakat	10
2.1.2 Bentuk-Bentuk Partisipasi Masyarakat.....	11
2.1.3 Tingkatan Partisipasi Masyarakat.....	16
2.1.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Partisipasi Masyarakat	17
2.1.5 Faktor Penghambat Partisipasi Masyarakat	21
2.2 Tinjauan Tentang Masyarakat	23
2.2.1 Pengertian Masyarakat.....	23
2.2.2 Bentuk-Bentuk Masyarakat.....	24
2.3 Tinjauan Tentang Pembangunan Desa.....	27
2.3.1 Definisi Pembangunan.....	27
2.3.2 Pembangunn Desa	28
2.3.3 Pembangunan Infrastruktur Desa	29
2.3.4 Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa	31
2.4 Peran Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat.....	33
III. METODE PENELITIAN	36
3.1 Desain Penelitian	36

3.2	Kriteria Kelayakan (<i>Eglibility Criteria</i>).....	37
3.3	Strategi Pencarian <i>Literature</i>	38
3.3.1	Database Pencarian.....	38
3.3.2	Kata Kunci yang Digunakan.....	38
3.4	Kriteria Inklusi dan Eksklusi.....	39
3.5	Cara Pengumpulan Data.....	43
3.6	Metode Analisis Data.....	43
3.7	Konsultasi.....	44
IV.	HASIL DAN PEMBAHASAN	45
4.1	Hasil.....	45
4.1.1	Hasil Pencarian dan Seleksi Studi.....	45
4.1.2	Daftar Artikel Hasil Pencarian.....	47
4.1.3	Daftar Artikel Bentuk-Bentuk Partisipasi Masyarakat	59
4.1.4	Daftar Artikel Faktor-Faktor yang mempengaruhi Partisipasi Masyarakat 61	
4.1.5	Daftar Artikel Peran Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat	64
4.1.6	<i>Mapping/ Scoping</i>	66
4.2	Pembahasan.....	71
4.2.1	Bentuk-Bentuk Partisipasi Masyarakat	71
4.2.2	Faktor-Faktor yang mempengaruhi Partisipasi Masyarakat.....	75
4.2.3	Peran Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat	79
V.	KESIMPULAN DAN SARAN	85
5.1	Kesimpulan	85
5.2	Saran	86

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Framework PICO(S)	8
2. Kriteria Inklusi dan Eksklusi	40
3. Daftar rangkuman analisis artikel partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur desa.....	47
4. Daftar Artikel Bentuk-Bentuk Partisipasi Masyarakat	59
5. Daftar Artikel Faktor-Faktor yang mempengaruhi Partisipasi Masyarakat	61
6. Daftar Artikel Peran Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat.....	64
7. Karakteristik umum dalam penyelesaian studi	66
8. Karakteristik Geografi.....	69
9. Tematik.....	70
10. Matriks Kesimpulan.....	84

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Diagram PRISMA <i>flowchart</i>	42
2. Diagram <i>flowchart</i> alur <i>review</i> artikel	46

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Partisipasi masyarakat dalam kebijakan pembangunan di negara-negara yang menerapkan demokrasi termasuk di Indonesia bukanlah hal yang baru. Partisipasi masyarakat merupakan suatu proses teknis untuk memberikan kesempatan dan kewenangan yang lebih luas kepada masyarakat secara bersama-sama untuk memecahkan berbagai persoalan. Pentingnya masyarakat dalam pembangunan desa ialah untuk mengingat masyarakat setempat yang lebih mengetahui berbagai permasalahan seperti pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan yang ada sehingga memudahkan proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan (Rorong dkk., 2017).

Landasan hukum pelaksanaan partisipasi masyarakat tertuang dalam UUD 1945 yang menyebutkan bahwa partisipasi adalah hak dasar warga negara, dan partisipasi politik sebagai prinsip dasar demokrasi. Dalam Pasal 78 ayat 1 dan 2 UU No. 6 Tahun 2014, dikatakan bahwa pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia, penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Partisipasi masyarakat memiliki banyak bentuk mulai dari keikutsertaan langsung masyarakat dalam program pemerintahan maupun yang sifatnya tidak langsung seperti sumbangan dana, tenaga, pikiran, maupun

pendapat atau bahkan penolakan dalam pembuatan kebijakan pemerintah. Sejauh ini partisipasi masyarakat masih terbatas pada keikutsertaan dalam pelaksanaan program-program atau kegiatan pemerintah, padahal partisipasi masyarakat tidak hanya diperlukan pada saat pelaksanaan tetapi juga mulai dari tahap perencanaan pengambilan keputusan (Rares dkk., 2017).

Setiap kegiatan pembangunan haruslah bersifat *pareto superior* (membangun menguntungkan segala pihak terutama masyarakat), bukan *pareto optimal* (membangun mengorbankan orang lain). Tujuan utama pembangunan adalah untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan warga negara Indonesia. Nilai-nilai penting dari partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah untuk; pertama, peran masyarakat adalah sebagai suatu strategi. Maksudnya, peran serta masyarakat merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan masyarakat (*public support*). Kedua, peran masyarakat sebagai suatu kebijakan. Masyarakat merupakan subjek yang potensial dikorbankan atau terkorbankan oleh pembangunan. Oleh sebab itu, masyarakat memiliki posisi tawar untuk mengonsultasikan haknya (*right be to consulted*) yang menjadi dasar kebijakan oleh pemerintah. Ketiga, peran serta masyarakat sebagai alat komunikasi. Peran serta masyarakat ditujukan untuk mendapatkan informasi untuk pengambilan keputusan-keputusan pemerintah. Keempat, peran serta masyarakat sebagai alat penyelesaian sengketa. Pada tahap ini peran serta masyarakat di dayagunakan untuk meredam konflik melalui upaya pencapaian konsensus dari pendapat-pendapat yang ada (detiknews.com diakses tanggal 18 Juni 2021).

Keterlibatan atau partisipasi dari masyarakat dalam proses pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai pada evaluasi hasil pembangunan sangat penting terutama di tingkat desa. Namun dalam praktiknya seringkali pembangunan infrastruktur menemui kendala terutama karena terbatasnya akses masyarakat terhadap pengambilan kebijakan pembangunan yang

dilakukan oleh pemerintah. Oleh sebab itu masyarakat desa seringkali hanya dijadikan sebagai objek pembangunan tanpa melihat sesungguhnya apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Pembangunan infrastruktur yang telah dibangun seringkali tidak dimanfaatkan secara optimal dan kurang dirawat karena masyarakat tidak mempunyai rasa memiliki atas sarana yang telah dibangun. Desain perencanaan dan pengelolaan yang ditentukan oleh elit pemerintahan, tingkat akuntabilitas yang rendah serta rentan manipulasi akibat kurang adanya transparansi dana yang dikelola menyebabkan lingkaran praktik korupsi terjadi di desa. Tidak heran jika seringkali kita menemui kualitas pembangunan infrastruktur desa yang buruk, misalnya jalan baru dibangun satu tahun tetapi kondisinya sudah rusak dan berlubang (masterplandesas.com diakses tanggal 18 Juni 2021).

Pembangunan infrastruktur desa seyogyanya disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat bukan keinginan masyarakat dan disepakati dengan metode partisipasi masyarakat. Perencanaan pembangunan yang transparan dan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur menjadi hal yang fundamental untuk dijalankan demi meminimalisir tindak penyimpangan dan ketidaktepatan sasaran program yang telah direncanakan. Masyarakat desa hendaknya dijadikan sebagai aktor pembangunan sehingga infrastruktur yang terwujud merupakan pembangunan dari, oleh, dan untuk masyarakat desa (masterplandesas.com diakses tanggal 18 Juni 2021).

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan juga merupakan hal yang penting ketika diletakkan atas dasar keyakinan bahwa masyarakatlah yang paling tahu apa yang dibutuhkan. Partisipasi yang hakiki akan melibatkan masyarakat dalam keseluruhan tahapan pembangunan, mulai dari proses perencanaan, pengambilan keputusan, dan pengawasan pelaksanaan serta evaluasi hasil atau output pembangunan desa (nasional.sindonews.com diakses tanggal 18 Juni 2021).

Sukardi dalam Gedeona (2010) menyatakan keterlibatan atau partisipasi masyarakat dalam pendekatan administrasi publik atau praktik penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi publik telah menjadi instrumen atau strategi utama untuk diaplikasikan, terdapat pakar yang menghubungkan partisipasi dengan tata kelola pemerintahan (*governance*) yang kemudian dikonseptualisasikan kedalam istilah *participatory governance*. Sementara ada pula yang melihat dan menghubungkan partisipasi tersebut dengan proses pembangunan, terutama terkait dengan peran pemerintah dan birokrasi serta masyarakat dalam pembangunan yang dikenal dengan istilah *participatory development*. Meskipun penggunaan konsep dan maknanya berbeda tetapi ruh yang menjiwai kedua konsep tersebut sama, yakni membahas betapa pentingnya partisipasi masyarakat baik itu dalam tata kelola pemerintahan maupun dalam proses pembangunan.

Slamet dalam Relidiansyah (2019) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan akan terwujud sebagai suatu kejadian nyata apabila terpenuhi faktor-faktor yang mendukungnya, yaitu adanya kesempatan, yaitu adanya suasana atau kondisi lingkungan yang disadari oleh orang tersebut bahwa dia berpeluang untuk berpartisipasi; adanya kemauan, yaitu adanya sesuatu yang mendorong atau menumbuhkan minat dan sikap mereka untuk termotivasi berpartisipasi, misalnya berupa manfaat yang dapat dirasakan atas partisipasinya tersebut dan adanya kemampuan, yaitu adanya kesadaran atau keyakinan pada dirinya bahwa dia mempunyai kemampuan untuk berpartisipasi, bisa berupa pikiran, tenaga, waktu, atau sarana dan material lainnya. Kemauan dan kemampuan merupakan potensi yang dimiliki oleh pelaku secara individu ataupun kelompok, sedangkan kesempatan lebih dipengaruhi oleh situasi atau lingkungan di luar diri pelaku.

Studi terdahulu yang telah memberikan gambaran terhadap penelitian ini ialah dilakukan oleh Hardianti dkk., (2017), Hayati (2017) dan Yeni (2018), hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur desa masih rendah dengan alasan kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya partisipasi mereka dalam program pembangunan tersebut dan salah satunya disebabkan rendahnya tingkat pendidikan. Penelitian selanjutnya ialah oleh Papudi dkk., (2019), Simanullang (2019) dan Putra (2019), hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur desa cukup baik dengan alasan masyarakat mulai ikut dalam tahapan pembangunan seperti pada tahap perencanaan namun kurang berpartisipasi dalam tahap pelaksanaan dan tahap evaluasi program pembangunan ataupun sebaliknya. Penelitian juga dilakukan oleh Irwan dkk., (2019), Rosmita (2019), Alfis dkk., (2019) dan Marlita (2020), hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur desa dikatakan baik dengan alasan masyarakat sudah aktif dalam partisipasi pengambilan keputusan pada rapat musrenbangdes, aktif pada pelaksanaan pembangunan dengan menyumbangkan tenaga, harta benda dan masyarakat pada tahap evaluasi pembangunan ikut mengawasi laporan kegiatan dari segi program, waktu maupun dana yang digunakan.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di atas berkaitan partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur desa hasil menunjukkan yang berbeda dengan berbagai faktor alasan. Sehubungan dengan hal ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian *literature review* dengan metode *scoping review*. Penelitian kepustakaan atau *literature review* merupakan penelitian untuk melakukan identifikasi, evaluasi dan interpretasi terhadap hasil penelitian topik atau fenomena tertentu yang menjadi perhatian peneliti (Kitchenham, 2004). *Scoping review* merupakan *literature review* untuk mensintesis hasil penelitian (Daudt et al., 2013). Tujuan *scoping review* untuk memetakan literatur yang ada dibidang yang menarik dalam hal volume, sifat, dan

karakteristik dari penelitian utama yang diteliti dengan langkah menyusun, meringkas, dan melaporkan hasil, yang memberikan ringkasan deskriptif dan numerik dari data dan analisis tematik jurnal terpilih (Pham, 2014).

Keberhasilan pembangunan harus melibatkan masyarakat secara aktif. Masyarakat harus dibangun, diberdayakan dan dilibatkan dalam perencanaan-perencanaan pembangunan secara partisipatif. Partisipasi sebenarnya diharapkan agar tujuan pembangunan di masyarakat berhasil maka program perencanaan, pelaksanaan kegiatan, bahkan monitoring dan evaluasi serta pemeliharaan hasil pembangunan benar-benar melibatkan masyarakat. Alasan logisnya, karena merekalah yang paling tahu akan permasalahan dan kebutuhan dalam rangka membangun wilayahnya.

Fenomena yang terjadi di masyarakat terhadap program pembangunan infrastruktur awalnya disambut dengan antusias yang tinggi, sehingga masyarakat turut terlibat berpartisipasi dalam setiap tahapan program mulai dari kegiatan sosialisasi, identifikasi perencanaan, serta pelaksanaan kegiatan. Seiring dengan waktu keikutsertaan masyarakat dalam program pembangunan mulai menurun untuk terlibat langsung dalam setiap tahapan. Antusias masyarakat hanya pada saat merencanakan dan melaksanakan pembangunan, namun setelah selesai kegiatan dan dimanfaatkan masyarakat tidak memelihara atau merawatnya. Pemerintah desa sebenarnya dituntut untuk melaksanakan pembangunan dengan menggunakan pendekatan perencanaan pembangunan yang melibatkan peran serta masyarakat, dimana masyarakat bukan hanya sebagai objek tetapi sekaligus sebagai subjek pembangunan, sehingga nuansa yang dikembangkan dalam perencanaan pembangunan benar-benar dari bawah (*bottom-up*). Karena dalam pembangunan infrastruktur desa yang ideal harus lebih didasarkan atau ditentukan oleh masyarakat itu sendiri sehingga memungkinkan tumbuhnya partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaannya. Di sisi lain, infrastruktur yang dibangun juga dapat

menumbuhkan rasa memiliki dan tanggungjawab masyarakat dalam mengelola dan memelihara setelah proyek tersebut berakhir. Maka yang seharusnya dilaksanakan oleh pemerintah desa adalah merencanakan dan melaksanakan pembangunan infrastruktur itu dengan menuntut dan melibatkan peran serta masyarakat agar berjalan sebagaimana mestinya. Fenomena ini membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur desa menggunakan metode *scoping review* hal ini dilakukan karena penelitian ini tidak hanya berfokus pada satu lokasi namun penulis ingin melihat partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur yang ada di desa-desa di Indonesia dari hasil penelitian terdahulu.

Proses identifikasi dan merumuskan topik tentang masalah penelitian penulis menggunakan strategi berdasarkan PICO ataupun PICOS *framework*, yang didasarkan pada topik atau masalah yang diangkat. PICO(S) *framework* adalah:

- a. *Population/Problem* yaitu populasi atau masalah yang akan dianalisis sesuai dengan tema yang telah ditentukan dalam *literature review*
- b. *Intervention/Indicators* yaitu suatu tindakan atau indikator dari masalah sesuai dengan tema yang diangkat dalam *literature review*
- c. *Comparison* yaitu intervensi yang digunakan sebagai pembandingan. Jika tidak ada dapat menggunakan kelompok kontrol dalam studi yang terpilih
- d. *Outcome* yaitu hasil atau luaran yang diperoleh pada studi terdahulu yang sesuai dengan tema dalam *literature review*.
- e. *Study design* yaitu desain penelitian yang digunakan dalam artikel yang akan direview.

Penggunaan PICO(S) akan membantu dalam mengidentifikasi konsep-konsep kunci dalam fokus review, mengembangkan istilah pencarian yang sesuai untuk menggambarkan masalah, dan menentukan kriteria inklusi dan eksklusi. Fokus pencarian dalam artikel ini adalah penelitian kualitatif. Berikut

Framework PICO(S) dalam penelitian Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Infrastruktur Desa.

Tabel 1. Framework PICO(S)

<i>Population/Problem</i>	Partisipasi Masyarakat
<i>Intervention/Indicators</i>	Pembangunan Infrastruktur
<i>Comparison</i>	Desa
<i>Outcome</i>	Bentuk-bentuk, jenis-jenis, tahapan, faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat, peran pemerintah desa
<i>Study design</i>	Kualitatif

(Sumber: diolah oleh peneliti, 2021)

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian menggunakan metode *scoping review* dengan memetakan literatur, menyusun, meringkas, dan melaporkan hasil, yang memberikan ringkasan deskriptif dari hasil penelitian terdahulu terkait dengan topik yang diteliti yaitu partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur desa. Sehubungan dengan hal ini maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Infrastruktur Desa: *Scoping Review*”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dikaji oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur desa melalui *scoping review*?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur desa melalui *scoping review*?
3. Bagaimana peran pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pembangunan infrastruktur desa melalui *scoping review*?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah:

1. Untuk memetakan bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur desa melalui *scoping review*.
2. Untuk memetakan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur desa melalui *scoping review*.
3. Untuk memetakan peran pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pembangunan infrastruktur desa melalui *scoping review*.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat dijadikan suatu bahan studi perbandingan selanjutnya dan dapat menjadi sumbangan pemikiran ilmiah, serta dapat melengkapi kajian-kajian yang mengarah pada ilmu pengetahuan, khususnya menyangkut masalah partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi suatu bahan masukan bagi pemerintah daerah dalam usaha meningkatkan partisipasi masyarakat di berbagai bidang khususnya dalam pembangunan infrastruktur desa.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Tentang Partisipasi Masyarakat

2.1.1 Konsep Partisipasi Masyarakat

Sebuah program tentunya sangat dibutuhkan partisipasi dari masyarakat sekitar agar program tersebut dapat dikatakan berhasil atau berjalan sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Partisipasi dari masyarakat juga dapat menunjukkan bagaimana suatu program dapat diterima atau tidaknya oleh masyarakat sekitar. Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan masyarakat sesuai hak dan kewajibannya sebagai subyek dan obyek pembangunan yang dimulai sejak tahap perencanaan sampai dengan pengawasan. Tujuan utama partisipasi adalah melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, pelaksanaan dan pengawasan dalam pencapaian tujuan program pembangunan. Hal ini sejalan dengan konsep-konsep partisipasi yang dikemukakan oleh beberapa ahli di bawah ini.

Bornby dalam Nur (2019) mengartikan partisipasi sebagai tindakan untuk “mengambil bagian” yaitu kegiatan atau pernyataan untuk mengambil bagian dari kegiatan dengan maksud memperoleh manfaat. Sementara itu Adisasmita dalam Nur (2019) mengatakan bahwa partisipasi anggota masyarakat adalah keterlibatan anggota masyarakat dalam pembangunan meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan (implementasi) program atau proyek pembangunan yang dikerjakan di dalam masyarakat lokal. Hal senada juga dikemukakan oleh Chandra dalam Nur (2019) yang menjelaskan bahwa partisipasi sebagai pengetahuan dan teknik yang ditujukan sebagai alat penyelesaian masalah-masalah pembangunan,

berjalan dan tidaknya, tergantung pada konteks-konteks spesifik yang terkait dengan faktor-faktor struktural, norma-norma yang berlaku, organisasi sosial, pola-pola hubungan kekuatan, pola-pola tindakan bersama, serta institusi-institusi politik yang telah digunakan sebelumnya dalam komunitas.

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa partisipasi dapat diartikan sebagai keikutsertaan atau keterlibatan individu atau kelompok dalam suatu aktivitas untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan, dengan harapan adanya partisipasi ini suatu tujuan yang telah ditentukan akan tercapai dengan maksimal.

2.1.2 Bentuk-Bentuk Partisipasi Masyarakat

Partisipasi dapat dibagi kedalam beberapa bentuk: Pertama, partisipasi dalam pengambilan keputusan, berkaitan dengan gagasan atau ide yang menyangkut kepentingan bersama. Wujud partisipasi dalam pengambilan keputusan ini antara lain seperti ikut menyumbangkan gagasan atau pemikiran, kehadiran dalam rapat, diskusi dan tanggapan atau penolakan terhadap program yang ditawarkan. Kedua, partisipasi dalam pelaksanaan meliputi menggerakkan sumber daya, dana, kegiatan administrasi, koordinasi dan penjabaran program. Partisipasi dalam pelaksanaan merupakan kelanjutan dalam rencana yang telah digagas sebelumnya baik yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan maupun tujuan. Ketiga, partisipasi dalam pengambilan manfaat. Partisipasi dalam pengambilan manfaat tidak lepas dari hasil pelaksanaan yang telah dicapai baik yang berkaitan dengan kualitas maupun kuantitas. Keempat, partisipasi dalam evaluasi. Bentuk partisipasi ini bertujuan untuk mengetahui ketercapaian program yang sudah direncanakan dan dilaksanakan sebelumnya. Tahap evaluasi dianggap penting sebab partisipasi masyarakat pada tahap ini

dianggap sebagai umpan balik yang dapat memberi masukan demi perbaikan pelaksanaan program kegiatan selanjutnya.

Bentuk partisipasi menurut Ndraha dalam Laksana (2013) meliputi:

- a. Peran serta dalam/melalui kontak dengan pihak lain (*contactchange*) sebagai suatu titik awal dalam perubahan sosial.
- b. Peran serta dalam memperhatikan atau menyerap dan memberikan tanggapan terhadap informasi, baik dalam arti menerima (menaati, memenuhi, dan melaksanakan) menerima dengan syarat maupun dalam arti menolaknya.
- c. Peran serta dalam pelaksanaan operasional pembangunan.
- d. Peran serta dalam menerima, memelihara, dan mengembangkan hasil pembangunan.
- e. Peran serta dalam menilai pembangunan yaitu keterlibatan masyarakat dalam menilai sejauhmana pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana dan sejauhmana hasilnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat menurut Huraerah dalam Nur (2019) adalah:

- a. Partisipasi buah pikiran
- b. Partisipasi tenaga, yang diberikan partisipan dalam berbagai kegiatan untuk perbaikan atau pembangunan desa, pertolongan bagi orang lain dan sebagainya.
- c. Partisipasi harta benda, yang diberikan orang dalam berbagai kegiatan untuk perbaikan atau pembangunan desa, pertolongan bagi orang lain yang biasanya berupa uang, makanan dan sebagainya
- d. Partisipasi keterampilan dan kemahiran.
- e. Partisipasi sosial, yang diberikan orang sebagai tanda keguyuban.

Menurut Yadav dalam Maulana (2019) terdapat empat bentuk partisipasi dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Partisipasi dalam Pembuatan Keputusan

Setiap program pembangunan masyarakat (termasuk pemanfaatan sumberdaya lokal dan alokasi anggarannya) selalu ditetapkan sendiri oleh pemerintah pusat, yang dalam banyak hal lebih mencerminkan sifat kebutuhan kelompok-kelompok elit yang berkuasa dan kurang mencerminkan keinginan dan kebutuhan masyarakat banyak. Oleh karena itu partisipasi masyarakat dalam pembangunan perlu ditumbuhkan melalui dibukanya forum yang memungkinkan masyarakat banyak berpartisipasi langsung dalam proses pengambilan keputusan tentang program-program pembangunan di wilayah setempat atau tingkat lokal.

b. Partisipasi dalam Pelaksanaan Kegiatan

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan harus diartikan sebagai pemerataan sumbangan masyarakat dalam bentuk tenaga kerja, uang tunai, dan atau beragam bentuk lainnya yang sepadan dengan manfaat yang akan diterima oleh masing-masing warga masyarakat yang bersangkutan. Selain partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan, partisipasi masyarakat juga diperlukan dalam pemeliharaan proyek-proyek pembangunan kemasyarakatan yang telah berhasil diselesaikan. Oleh sebab itu, perlu adanya kegiatan khusus untuk mengorganisir warga masyarakat guna memelihara hasil-hasil pembangunan agar manfaatnya dapat terus dinikmati.

c. Partisipasi dalam Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan

Kegiatan pemantauan dan evaluasi program dan proyek pembangunan sangat diperlukan. Bukan saja agar tujuannya dapat dicapai seperti yang diharapkan, tetapi juga diperlukan untuk memperoleh umpan balik tentang masalah-masalah dan kendala yang muncul dalam pelaksanaan

pembangunan yang bersangkutan. Dalam hal ini partisipasi masyarakat untuk mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan perkembangan kegiatan serta perilaku aparat pembangunan sangat diperlukan.

d. Partisipasi dalam Pemanfaatan Hasil Pembangunan

Partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan, merupakan unsur terpenting yang sering terlupakan. Sebab tujuan pembangunan adalah untuk memperbaiki mutu hidup masyarakat banyak sehingga pemerataan hasil pembangunan merupakan tujuan utama. Pemanfaatan hasil pembangunan akan merangsang kemauan dan kesukarelaan masyarakat untuk selalu berpartisipasi dalam setiap program pembangunan yang akan datang. Namun pemanfaatan hasil pembangunan sering kurang mendapat perhatian pemerintah dan administrator pembangunan pada umumnya yang seringkali menganggap bahwa dengan selesainya pelaksanaan pembangunan itu otomatis manfaatnya akan pasti dapat dirasakan oleh masyarakat Sasarannya. Padahal seringkali masyarakat sasaran tidak memahami manfaat dari setiap program pembangunan secara langsung sehingga hasil pembangunan yang dilaksanakan menjadi sia-sia.

Cohen dan Uphoff dalam Dwijosusilo (2020) membedakan partisipasi menjadi empat jenis, yaitu:

a. Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan

Partisipasi dalam pengambilan keputusan ini terutama berkaitan dengan penentuan alternatif dengan masyarakat untuk menuju kata sepakat tentang berbagai gagasan yang menyangkut kepentingan bersama. Partisipasi dalam hal pengambilan keputusan ini sangat penting karena masyarakat menuntut untuk ikut menentukan arah dan orientasi pembangunan. Wujud dari partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan ini bermacam-macam, seperti kehadiran rapat, diskusi,

sumbangan pemikiran, tanggapan atau penolakan terhadap program yang ditawarkan.

b. Partisipasi dalam pelaksanaan

Partisipasi dalam pelaksanaan program merupakan lanjutan dari rencana yang telah disepakati sebelumnya, baik yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, maupun tujuan. Didalam pelaksanaan program, sangat dibutuhkan keterlibatan berbagai unsur, khususnya pemerintah dalam kedudukannya sebagai fokus atau sumber utama pembangunan.

c. Partisipasi dalam pengambilan manfaat

Partisipasi dalam pengambilan manfaat ini tidak terlepas dari kualitas dan kuantitas dari hasil pelaksanaan program yang bisa dicapai. Dari segi kualitas keberhasilan suatu program akan ditandai dengan adanya peningkatan output, sedangkan dari segi kualitas dapat dilihat seberapa besar persentase keberhasilan program yang dilaksanakan apakah sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

d. Partisipasi dalam evaluasi

Partisipasi dalam evaluasi ini berkaitan dengan masalah pelaksanaan program secara menyeluruh. Partisipasi ini bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan program telah sesuai dengan rencana yang ditetapkan atau ada penyimpangan.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dibagi menjadi beberapa bentuk yaitu partisipasi buah pikiran, partisipasi tenaga, partisipasi harta benda, partisipasi masyarakat yang dimulai dari sebuah perencanaan, pelaksanaan sampai evaluasi dalam sebuah kegiatan atau program.

2.1.3 Tingkatan Partisipasi Masyarakat

Tingkatan partisipasi masyarakat sebagai salah satu indikator keberhasilan perlu diketahui oleh agen pembangunan. Oleh karena itu, indikator dalam mengevaluasi tingkat partisipasi masyarakat penting dipahami secara benar. Mengukur partisipasi masyarakat menurut Ife dan Tesoriero dalam Aletha (2019) secara kualitatif mencakup:

- a. Suatu kapasitas masyarakat yang tumbuh untuk mengorganisasi aksi
- b. Dukungan yang tumbuh dalam masyarakat dan jaringan yang bertambah kuat
- c. Peningkatan pengetahuan masyarakat tentang hal-hal seperti keuangan dan manajemen proyek
- d. Keinginan masyarakat untuk terlibat dalam pembuatan keputusan
- e. Peningkatan kemampuan dari mereka yang berpartisipasi dalam mengubah keputusan menjadi aksi
- f. Meningkatnya jangkauan partisipasi melebihi proyek untuk mewakilinya dalam organisasi-organisasi lain.
- g. Pemimpin-pemimpin yang muncul dari masyarakat
- h. Meningkatnya jaringan dengan proyek-proyek, masyarakat, dan organisasi lainnya, dan
- i. Mulai mempengaruhi kebijakan.

Wilcox dalam Nur (2019), mengemukakan adanya 5 (lima) tingkatan partisipasi, yaitu:

- a. Memberikan informasi (*information*).
- b. Konsultasi (*consultation*) yaitu menawarkan pendapat, sebagai pendengar yang baik untuk memberikan umpan balik, tetapi tidak terlibat dalam implementasi ide dan gagasan tersebut.

- c. Pengambilan keputusan bersama (*deciding together*) dalam arti memberikan dukungan terhadap ide, gagasan, pilihan-pilihan serta mengembangkan peluang yang diperlukan guna pengambilan keputusan.
- d. Bertindak bersama (*acting together*) dalam arti tidak sekedar ikut dalam pengambilan keputusan, tetapi juga terlibat dan menjalin kemitraan dalam pelaksanaan kegiatan
- e. Memberikan dukungan (*supporting independent community interest*) dimana kelompok-kelompok lokal menawarkan pendanaan, nasehat, dan dukungan lain untuk mengembangkan agenda kegiatan.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa tingkatan partisipasi dapat dilihat dari keinginan masyarakat terlibat dalam sebuah program mulai dari perencanaan sampai evaluasi, pemimpin yang berasal dari masyarakat dan mulai mempengaruhi kebijakan, memberikan informasi, konsultasi, bertindak bersama dan saling memberikan dukungan.

2.1.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Partisipasi Masyarakat

Sebuah program tentunya sangat dibutuhkan partisipasi dari masyarakat sekitar agar program tersebut dapat dikatakan berhasil atau berjalan sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Partisipasi dari masyarakat juga dapat menunjukkan bagaimana suatu program dapat diterima atau tidaknya oleh masyarakat sekitar.

Slamet dalam Nur (2019), menyatakan bahwa tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, sangat ditentukan oleh tiga unsur pokok, yaitu:

- a. Adanya kesempatan yang diberikan kepada masyarakat untuk berpartisipasi
- b. Adanya kemauan masyarakat untuk berpartisipasi
- c. Adanya kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi

Goldsmith dan Blustain dalam Agustin (2016) menjelaskan bahwa masyarakat tergerak untuk berpartisipasi jika:

- a. Partisipasi itu dilakukan melalui organisasi yang sudah dikenal atau yang sudah ada di tengah-tengah masyarakat yang bersangkutan.
- b. Partisipasi itu memberikan manfaat langsung kepada masyarakat yang bersangkutan.
- c. Manfaat yang diperoleh melalui partisipasi itu dapat memenuhi kepentingan masyarakat setempat.
- d. Dalam proses partisipasi itu terjamin adanya kontrol yang dilakukan oleh masyarakat. Partisipasi masyarakat ternyata berkurang jika mereka tidak atau kurang berperanan dalam pengambilan keputusan.

Sementara itu, Najib dalam Aletha (2019) menjelaskan bahwa keberhasilan partisipasi masyarakat dipengaruhi oleh:

- a. Siapa penggagas partisipasi, apakah pemerintah pusat, pemerintah daerah atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
- b. Untuk kepentingan siapa partisipasi itu dilaksanakan, apakah untuk kepentingan pemerintah atau untuk masyarakat.
- c. Siapa yang memegang kendali, apakah pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau lembaga donor. Jika pemerintah daerah dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang memegang kendali cenderung lebih berhasil. Hal ini dikarenakan cenderung mengetahui permasalahan, kondisi dan kebutuhan daerah atau masyarakatnya dibandingkan pihak luar.

- d. Hubungan pemerintah dengan masyarakat, apakah ada kepercayaan dari masyarakat terhadap pemerintahannya. Jika hubungan ini baik, partisipasi akan lebih mudah dilaksanakan.
- e. Kultural, daerah yang masyarakatnya memiliki tradisi dalam berpartisipasi (proses pengambilan keputusan melalui musyawarah) cenderung lebih mudah dan berlanjut.
- f. Politik, pemerintahan yang stabil serta menganut sistem yang transparan, menghargai keragaman dan demokratis.
- g. Legalitas, tersedianya (diupayakan) regulasi yang menjamin partisipasi warga dalam pengelolaan pembangunan (terintegrasi dalam sistem pemerintahan di daerah).
- h. Ekonomi, adanya mekanisme yang menyediakan akses bagi warga miskin untuk terlibat atau memastikan bahwa mereka akan memperoleh manfaat (baik langsung maupun tidak langsung) setelah berpartisipasi.
- i. Kepemimpinan, adanya kepemimpinan yang disegani dan memiliki komitmen untuk mendorong serta melaksanakan partisipasi, dapat dari kalangan pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), masyarakat itu sendiri atau tokoh masyarakat.
- j. Waktu, penerapan partisipasi tidak hanya sesaat, tetapi ditempatkan pada kurun waktu yang cukup lama.
- k. Tersedianya jaringan yang menghubungkan antara warga masyarakat dan pemerintah (forum warga).

Angell dalam Simanullang (2019) mengatakan partisipasi yang tumbuh dalam masyarakat dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan seseorang dalam berpartisipasi, yaitu: usia, pendidikan, pekerjaan dan penghasilan, dan lamanya tinggal.

Kogoya dalam Ismatullah (2021) menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur, yaitu: faktor ekonomi, faktor kesadaran dan faktor pendidikan.

Menurut Slamet dalam Tumbel (2017) untuk faktor-faktor internal adalah berasal dari dalam kelompok masyarakat sendiri, yaitu individu-individu dan kesatuan kelompok didalamnya. Tingkah laku individu berhubungan erat atau ditentukan oleh ciri-ciri sosiologis seperti umur, jenis kelamin, pengetahuan, pekerjaan dan penghasilan. Secara teoritis, terdapat hubungan antara ciri-ciri individu dengan tingkat partisipasi, seperti usia, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, lamanya menjadi anggota masyarakat, besarnya pendapatan, keterlibatan dalam kegiatan pembangunan akan sangat berpengaruh pada partisipasi.

Menurut Deviyanti dalam Hastuty (2021) faktor-faktor eksternal ini dapat dikatakan petaruh (*stakeholder*), yaitu dalam hal ini *stakeholder* yang mempunyai kepentingan dalam program ini adalah pemerintah daerah, pengurus desa/kelurahan (RT/RW), tokoh masyarakat dan konsultan. Petaruh kunci adalah siapa yang mempunyai pengaruh yang sangat signifikan, atau mempunyai posisi penting guna kesuksesan program.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa keberhasilan partisipasi dipengaruhi faktor-faktor baik internal maupun eksternal seperti kesadaran dari diri sendiri, rasa tanggungjawab, merasa ada manfaat setelah melakukan partisipasi.

2.1.5 Faktor Penghambat Partisipasi Masyarakat

Soetrisno dalam Aletha (2019) mengidentifikasi beberapa masalah kaitanya dengan pengembangan partisipasi masyarakat dalam pembangunan yakni:

- a. Masalah pertama dan terutama dalam pengembangan partisipasi masyarakat adalah belum dipahaminya makna sebenarnya tentang partisipasi oleh pihak perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
 - 1) Pada tataran perencanaan pembangunan, partisipasi didefinisikan sebagai kemauan masyarakat untuk secara penuh mendukung pembangunan yang direncanakan dan ditetapkan sendiri oleh (aparatur) pemerintah, sehingga masyarakat bersifat pasif dan hanya sebagai sub-ordinasi pemerintah.
 - 2) Pada pelaksanaan pembangunan di lapangan, pembangunan yang dirancangkan dan ditetapkan oleh pemerintah didefinisikan sebagai kebutuhan masyarakat, sedangkan yang dirancang dan ditetapkan masyarakat didefinisikan sebagai keinginan masyarakat yang memperoleh prioritas lebih rendah.
 - 3) Partisipasi masyarakat, sering didefinisikan sebagai kerjasama pemerintah dan masyarakat yang tidak pernah memperhatikan adanya sub-sistem yang disubordinasikan oleh supra-sistem, dan aspirasi masyarakat cukup diakomodasikan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
- b. Masalah kedua adalah, dengan dikembangkannya pembangunan sebagai ideologi baru yang harus diamankan dengan dijaga ketat, yang mendorong aparat pemerintah bersifat otoriter.
- c. Masalah ketiga adalah banyaknya peraturan yang meredam keinginan masyarakat untuk berpartisipasi.

Dwiningrum dalam Aletha (2019) menyebutkan faktor-faktor yang dapat menghambat partisipasi masyarakat antara lain:

- a. Sifat malas, apatis, masa bodo, dan tidak mau melakukan perubahan di tingkat anggota masyarakat
- b. Aspek-aspek tipologis
- c. Geografis (pulau-pulau kecil yang tersebar letaknya)
- d. Demografis (jumlah penduduk)
- e. Ekonomi (desa miskin atau tertinggal).

Solekhan dalam Aletha (2019) mengatakan ada dua kategori yang dapat menghambat partisipasi masyarakat, yakni:

- a. Terbatasnya ruang partisipasi masyarakat

Ruang partisipasi masyarakat merupakan arena bagi masyarakat baik individu maupun kelompok untuk dapat berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan desa. Makna ruang disini tidak terbatas pada makna spasial (tempat) saja tetapi juga berupa forum, pertemuan maupun media lainnya yang dapat memberikan peluang masyarakat untuk mengakses secara terbuka dan adil. Jenis forum yang biasa dipergunakan masyarakat adalah Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes), namun dalam pelaksanaannya cenderung bersifat simbolik dan formalitas belaka. Akibatnya forum Musrenbangdes menjadi tidak kapabel untuk mewadai aspirasi dan kepentingan masyarakat.

- b. Melemahnya Modal Sosial

Menurut Bardhan dalam Aletha (2019) modal sosial merupakan serangkaian norma, jaringan dan organisasi, dimana masyarakat mendapat akses pada kekuasaan dan sumber daya di mana pembuatan keputusan dan kebijakan dilakukan. Dalam konteks interaksi sosial, modal sosial, terwujud dalam bentuk jaringan atau asosiasi informal seperti arisan, jamaah tahlil, dan sebagainya. Asosiasi tersebut sifatnya

eksklusif dan hanya melakukan kegiatan yang sifatnya keagamaan, ekonomi yang kurang berpengaruh terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan desa.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang menghambat dalam partisipasi yaitu kesadaran dari individu, sifat malas, tidak peduli dan tidak mau melakukan perubahan, faktor geografis, ekonomi dan terbatasnya ruang partisipasi masyarakat.

2.2 Tinjauan Tentang Masyarakat

2.2.1 Pengertian Masyarakat

Menurut Soekanto dalam Aletha (2019) para antropologi sosial biasanya mengartikan masyarakat sebagai wadah dari orang-orang yang buta huruf, mengadakan reproduksi sendiri, mempunyai adat istiadat, mempertahankan ketertiban dengan menerapkan sanksi-sanksi sebagai sarana pengendalian sosial, dan yang mempunyai wilayah tempat tinggal yang khusus. Istilah masyarakat terkadang dipergunakan dalam artian "*gesellschaft*" atau sebagai asosiasi manusia yang ingin mencapai tujuan-tujuan tertentu yang terbatas sifatnya, sehingga direncanakan pembentukan organisasi-organisasi tertentu, dalam hal ini maka masyarakat adalah kelompok manusia yang sengaja dibentuk secara rasional, untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tertentu pula.

Menurut Soekanto dalam Aletha (2019) masyarakat sebenarnya merupakan suatu bentuk kehidupan bersama manusia, yang mempunyai ciri-ciri pokok, sebagai berikut:

1. Manusia yang hidup bersama secara teoritis, maka jumlah manusia yang hidup bersama ada dua orang. Didalam ilmu-ilmu sosial, khususnya

sosiologi, tidak ada suatu ukuran yang mutlak ataupun angka yang pasti untuk menentukan berapa jumlah manusia yang harus ada.

2. Bergaul selama jangka waktu yang cukup lama.
3. Adanya kesadaran, bahwa setiap manusia merupakan bagian dari suatu kesatuan.
4. Adanya nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi patokan bagi perilaku yang dianggap pantas.
5. Menghasilkan kebudayaan dan mengembangkan kebudayaan tersebut.

2.2.2 Bentuk-Bentuk Masyarakat

Menurut Soemardjan dalam Aletha (2019) masyarakat di Indonesia dibagi menjadi tiga kategori yakni masyarakat sederhana, masyarakat madya dan masyarakat pra-modern atau masyarakat modern. Adapun ciri-ciri utama dari masyarakat-masyarakat tersebut, adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat sederhana:
 - a) Hubungan dalam keluarga dan dalam masyarakat setempat sangat kuat,
 - b) Organisasi sosial pada pokoknya didasarkan atas adat istiadat yang terbentuk menurut tradisi,
 - c) Kepercayaan kuat pada kekuatan-kekuatan gaib yang mempengaruhi kehidupan manusia, akan tetapi tidak dapat dikuasai olehnya, tidak ada lembaga-lembaga khusus untuk memberi pendidikan dalam bidang teknologi, keterampilan diwariskan oleh orang tua kepada anak sambil berpraktek dengan sedikit teori dan pengalaman dan tidak dari hasil pemikiran atau eksperimen,
 - d) Tingkat buta huruf relatif tinggi,

- e) Hukum yang berlaku tidak tertulis, tidak kompleks dan pokok-pokoknyadiketahui dan difahami oleh hampir semua warga masyarakat yang sudah dewasa,
- f) Ekonominya sebagian besar meliputi produksi untuk keperluan keluarga sendiri atau untuk pasaran kecil setempat, sedangkan uang sebagai alat penukar dan alat pengukur harga berperan secara terbatas sekali,
- g) Kegiatan ekonomi dan sosial yang memerlukan kerjasama orang banyak dilakukan secara tradisional dengan gotong royong tanpa hubungan kerja antar buruh dengan majikan.

2. Masyarakat Madya

- a) Hubungan dalam keluarga tetap kuat, akan tetapi hubungan dalam masyarakat setempat sudah mulai mengendor dan menunjukkan gejala-gejala hubungan atas dasar perhitungan ekonomi,
- b) Adat-istiadat masih dihormati, akan tetapi sikap masyarakat mulai terbuka bagi pengaruh dari luar,
- c) Dengan timbulnya rasionalitas dalam cara berfikir maka kepercayaan pada kekuatan-kekuatan gaib baru timbul apabila orang sudah kehabisan akal untuk menanggulangi suatu masalah,
- d) Di dalam masyarakat timbul lembaga-lembaga pendidikan formal sampaitingkat sekolah lanjutan pertama, akan tetapi masih jarang sekali adanya lembaga pendidikan keterampilan atau kejuruan,
- e) Tingkat buta huruf relatif turun,
- f) Hukum tertulis mulai mendampingi hukum tidak tertulis,
- g) Ekonomi masyarakat memberi kesempatan lebih banyak kepada produksibuat pasaran, dan mulai menimbulkan diferensiasi dalam struktur masyarakat, dan uang semakin meningkat peranannya,

- h) Gotong royong tradisional tinggal untuk keperluan sosial di kalangan keluarga besar dan tetangga, akan tetapi gotong royong untuk keperluan umum dilakukan atas dasar upah.
3. Masyarakat pra-modern atau modern:
- a) Hubungan antar manusia terutama didasarkan atas kepentingan pribadi,
 - b) Hubungan dengan masyarakat-masyarakat lain dilakukan secara terbuka dalam suasana saling pengaruh-mempengaruhi, kecuali (mungkin) dalam penjagaan rahasia penemuan-penemuan baru,
 - c) Kepercayaan kuat pada manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai sarana untuk senantiasa meningkatkan kesejahteraan masyarakat,
 - d) Masyarakat digolongkan menurut bermacam-macam profesi serta keahlian yang masing-masing dapat dipelajari dan ditingkatkan dalam lembaga-lembaga pendidikan keterampilan dan kejuruan,
 - e) Tingkat pendidikan formal adalah tinggi dan merata,
 - f) Hukum yang berlaku pada pokoknya hukum tertulis yang sangat kompleks,
 - g) Ekonomi hampir seluruhnya merupakan ekonomi pasaran yang didasarkan atas penggunaan uang dan alat-alat pembayaran lain.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa masyarakat merupakan interaksi yang dilakukan oleh kelompok manusia yang telah bermukim dan bekerja sama dalam suatu wilayah (tempat) tertentu. Serta terdapat nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi patokan dalam berperilaku.

2.3 Tinjauan Tentang Pembangunan Desa

2.3.1 Definisi Pembangunan

Menurut Listyaningsih dalam Sirait (2021) pembangunan didefinisikan sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu Negara menuju arah yang lebih baik. Menurut Tjokroamidjojo dalam Sirait (2021) istilah pembangunan belum menemukan suatu kesepakatan arti seperti halnya modernisasi. Pembangunan biasanya secara umum didefinisikan sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu Negara dan bangsa menuju modernitas. Pembangunan juga diarahkan kepada perubahan paradigma atau mindset masyarakat dari tradisional menuju modern. Maka inti dari arti pembangunan menurutnya adalah sebuah proses yang harus dilalui sebuah Negara dalam rangka pencapaian tujuan Negara yang bersangkutan. Selanjutnya menurut Afifuddin dalam Sirait (2021) hakikat pembangunan adalah membangun masyarakat atau bangsa secara menyeluruh demi mencapai kesejahteraan rakyat.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa pembangunan adalah semua proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana. Sedangkan pelaksanaan adalah strategi yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Tujuan utama dari pembangunan adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, untuk itu pemerintah harus mengetahui lebih jelas mengenai masyarakat, apakah yang ingin oleh masyarakat dalam hidupnya. Memang beragam usaha dari berbagai sektor sudah dilakukan oleh pemerintah dalam pencapaian tujuan pembangunan. Namun, sering kali terjadi bahwa usaha dan niat baik tersebut tidak mencapai seluruh masyarakat terutama

masyarakat pedesaan. Hal ini disebabkan karena pembangunan lebih banyak difokuskan dipertanian dibandingkan di pedesaan.

2.3.2 Pembangunan Desa

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 78 ayat (1) pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desaan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan desa pada hakikatnya mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong royongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

Desa menyusun perencanaan pembangunan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten atau kota. Dokumen rencana Pembangunan Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di desa dan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Perencanaan Pembangunan Desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan swadaya masyarakat desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/kota berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat desa.

Menurut Sjafrizal dalam Sirait (2021) perencanaan pembangunan daerah pada dasarnya adalah bersifat multidisipliner karena cakupannya yang luas meliputi aspek geografi, ekonomi, sosial, budaya, politik, pemerintahan, dan fisik. Karena itu, penyusunan perencanaan pembangunan daerah

memerlukan suatu tim perencana yang mempunyai beberapa keahlian dalam ilmu terkait seperti planologi, teknik, ekonomi, pertanian, hukum, pemerintahan, dan sosial budaya.

Pembangunan desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa dengan semangat gotong royong serta memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam desa. Pelaksanaan program sektor yang masuk ke desa di informasikan kepada Pemerintah Desa dan diintegrasikan dengan rencana pembangunan desa. Masyarakat desa berhak mendapatkan informasi dan melakukan pemantauan mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan desa. Pembangunan kawasan pedesaan dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa di kawasan pedesaan. Pembangunan kawasan pedesaan meliputi:

- a) Penggunaan dan pemanfaatan wilayah desa dalam rangka penetapan kawasan pembangunan sesuai dengan tata ruang kabupaten/kota;
- b) Pelayanan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan;
- c) Pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi perdesaan, dan pengembangan teknologi tepat guna; dan
- d) Pemberdayaan masyarakat desa untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan dan kegiatan ekonomi.

2.3.3 Pembangunan Infrastruktur Desa

Infrastruktur adalah sebuah sistem fasilitas publik yang bersifat fundamental di tujukan kepada masyarakat atau khalayak ramai untuk melayani dan memudahkan masyarakat. Menurut Siagian dalam Baru (2015) pembangunan infrastruktur merupakan suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang dilakukan secara terencana untuk

membangun prasarana atau segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses pembangunan.

Definisi ini mengimplikasikan adanya perbedaan lapisan dari stuktur yang ada ibaratnya menyediakan *support* atau layanan (*service*). Dalam dunia fisik, terminologi infrastruktur kadang merujuk kepada keperluan-keperluan publik, seperti air, listrik, gas, pembuangan air, dan layanan telepon. Infrastruktur memiliki beberapa karakteristik tertentu, termasuk:

1. Digunakan bersama-sama (*shared*) oleh pengguna yang lebih luas, ketimbang struktur-struktur yang didukungnya.
2. Lebih statis dan permanen ketimbang struktur-struktur yang didukungnya.
3. Lebih dipandang sebagai sebuah *service* (*considered a service*), termasuk orang-orang dan proses yang dilibatkan dalam support, lebih dari sekedar sebuah struktur atau perlengkapan (*device*) fisik.
4. Terkadang terhubung secara fisik ke struktur yang didukungnya.
5. Terpisah (*distinct*) dari strktur-struktur yang didukungnya dalam hak kepemilikannya dan orang-orang.

Menurut Kuncoro dalam Darmawansyah (2021) infrastruktur mengacu pada sistem fisik yang menyediakan transportasi, air, bangunan, dan fasilitas publik lain yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia secara ekonomi dan sosial. Pembangunan fisik adalah pembangunan yang dapat di rasakan langsung oleh masyarakat atau pembangunan yang tampak oleh mata misalnya berupa Infrastruktur, bangunan, fasilitas umum dan lainnya. Infrastruktur memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Keberadaan infrastruktur yang memadai sangat diperlukan. Sarana dan prasarana fisik, atau sering disebut dengan infrastruktur merupakan bagian yang sangat penting dalam sistem pelayanan masyarakat.

Keberadaan infrastruktur yang baik memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang pemenuhan hak dasar masyarakat seperti pangan, sandang, papan, pendidikan dan kesehatan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa infrastruktur merupakan modal yang sangat dibutuhkan masyarakat dalam mendukung kegiatan diberbagai bidang. Pembangunan infrastruktur yang berkualitas akan menciptakan kemakmuran masyarakat. Pembangunan infrastruktur desa diselenggarakan untuk kepentingan masyarakat. Dimana hasil pembangunan tersebut memang benar-benar harus dapat dirasakan oleh masyarakat desa sehingga pada akhirnya dapat berdampak terhadap perbaikan dan peningkatan taraf hidup masyarakat desa.

Dikatakan oleh Badan Penelitian dan Pembangunan Dalam Negeri dalam Baru (2015) pembangunan sarana fisik diartikan sebagai alat atau fasilitas yang dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat, pembangunan sarana dan prasarana fisik seperti dimaksud, berupa:

1. Pembangunan infrastruktur transportasi perdesaan guna mendukung peningkatan aksesibilitas masyarakat desa, yaitu: jalan, jembatan, tambatan perahu;
2. Pembangunan infrastruktur yang mendukung produksi pertanian, yaitu: irigasi perdesaan;
3. Pembangunan infrastruktur yang mendukung pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, meliputi: penyediaan air minum, sanitasi perdesaan.

2.3.4 Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa

Pendekatan partisipatif dalam pembangunan desa adalah pendekatan dimana partisipasi masyarakat atau rakyat diwujudkan pada setiap tahapan program atau proyek pembangunan (perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta tindak lanjut) dimana pemecahan masalah dan

pemenuhan kebutuhan masyarakat menjadi landasan atau dasar bagi bergulirnya program atau proyek pembangunan. Asumsi yang digunakan dalam pendekatan ini ialah “keterlibatan penuh masyarakat” dalam setiap tahapan pembangunan disandarkan pada kemampuan diri sendiri (kemandirian), artinya proses pembangunan akan diperkuat oleh proses belajar yang terus menerus dalam masyarakat (proses dibangun berdasarkan pengalaman); artinya pembangunan disesuaikan dengan kemampuan dan perkembangan masyarakat (Ohama dalam Sangian 2018).

Menurut Marzuki dalam Sangian (2018) ada dua ciri penting dari pendekatan partisipatif dalam pembangunan desa, yaitu: pertama, adanya kemitraan atas dasar kesamaan antara pemerintah dan masyarakat setempat yang diwujudkan dalam fase pengambilan keputusan dan implementasi keputusan program dan kedua, bahwa masyarakat setempat sendiri yang membuat keputusan mereka dan mengambil tanggung jawab penuh dalam perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi program dengan dukungan pemerintah.

Jamiesson dalam Sangian (2018) menyebutkan ada dua perspektif yang mendasari paradigma pembangunan partisipatif yaitu : pertama, melibatkan masyarakat setempat dalam pemilihan, perancangan, dan pelaksanaan program atau proyek yang akan mewarnai hidup mereka, sehingga dengan demikian dapatlah dijamin bahwa persepsi masyarakat setempat, pola-pola sikap dan pola berpikir serta nilai-nilai dan pengetahuannya ikut dipertimbangkan secara penuh dan kedua, membuat umpan-balik (*feedback*) terhadap program atau proyek yang pada dasarnya merupakan bagian tak terlepas dari kegiatan pembangunan desa. Oleh karena itu tujuan yang dapat dicapai dengan menerapkan pendekatan partisipatif dalam semua tahapan atau proses pembangunan desa ialah: pertama, mengikutsertakan semua kelompok kepentingan dalam setiap tahapan

proses pembangunan desa, kedua menumbuhkan rasa memiliki masyarakat terhadap setiap tahapan proses pembangunan, ketiga dihargainya inisiatif masyarakat dalam setiap tahapan proses pembangunan desa dan keempat, munculnya kemandirian dari masyarakat dalam mengatasi masalah yang ada di lingkungannya.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa konsep pendekatan partisipatif dalam pembangunan desa adalah suatu pendekatan proses pembangunan desa dimana intinya adalah masyarakat dilibatkan atau terlibat dalam merumuskan, merencanakan, melaksanakan, dan menilai program-program pembangunan desa. Dengan kata lain bahwa pembangunan desa dengan pendekatan partisipatif adalah pembangunan desa yang dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat desa dalam setiap tahapan proses pembangunan desa baik dalam tahap perencanaan atau pengambilan keputusan program, tahap pelaksanaan program, dan tahap *monitoring* dan evaluasi atau penilaian hasil-hasil pembangunan desa.

2.4 Peran Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat

Soekanto dalam Hakim (2018) mengatakan peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Dari hal di atas dapat dilihat pendapat lain tentang peran yang telah ditetapkan sebelumnya disebut sebagai peranan normatif. Merton dalam Rukayat (2016) mengatakan bahwa peranan didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu. Sejumlah peran disebut sebagai perangkat peran (*role-set*). Dengan demikian perangkat peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karena menduduki status-status sosial khusus. Dalam pengertian peran menurut definisi para ahli menyatakan bahwa pengertian

peran adalah aspek dinamis dari kedudukan atau status. Seseorang melaksanakan hak dan kewajiban, berarti telah menjalankan suatu peran.

Saparin dalam Hakim (2018) kepala desa adalah penguasa tunggal di dalam pemerintahan desa, bersama-sama dengan pembantunya dan ia merupakan pamong desa dalam pelaksanaan penyelenggaraan urusan rumah tangga desa, di samping itu ia menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahan. Undang-undang nomor 6 tahun 2014 menyebutkan kepala desa yaitu kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa, oleh karena itu kepala desa mempunyai peran dan juga kedudukan yang sangat penting dalam pemerintahan desa. Ia merupakan pemimpin terhadap jalannya roda pemerintahan pemerintahan yang ada di desa.

Peran pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pembangunan infrastruktur desa yaitu:

1. Peran sebagai motivator: peran kepala desa dalam hal memotivasi masyarakatnya dalam pembangunan desa adalah dengan cara mengundang atau mengajak seluruh masyarakat berpartisipasi dalam menentukan program-program desa. Karena dengan partisipasi masyarakat dalam mencanangkan program desa masyarakat akan lebih paham apa yang dibutuhkan.
2. Peran sebagai fasilitator: peran kepala desa sebagai fasilitator selalu memberikan fasilitas-fasilitas yang menunjang guna seperti halnya tempat pertemuan. Peran pemerintah desa sebagai fasilitator adalah dengan menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan untuk menjembatani berbagai kepentingan masyarakat dalam mengoptimalkan pembangunan desa. Sebagai fasilitator pemerintah desa bergerak dibidang pelatihan, pendidikan, peningkatan keterampilan serta dibidang permodalan

melalui pemberian bantuan modal kepada masyarakat yang diberdayakan.

3. Peran sebagai mobilisator: peran kepala desa sebagai mobilisator, menggerakkan atau mengajak masyarakat untuk ikut bersama-sama melakukan tindakan yang nyata untuk membangun desa, misalnya melakukan kerja bakti dan menggerakkan masyarakat dalam pertemuan desa. Dalam mewujudkan pola hubungan kemitraan atau kebersamaan, dan pengembangan program-program pembangunan secara partisipatif dan mandiri melalui rapat atau pertemuan desa antara pemerintah desa.
4. Peran sebagai inovator: peran pemerintah desa sebagai inovator berupa pembuat perubahan dengan menyiapkan program pembangunan desa dengan bahasan sederhana serta dapat menggugah keinginan dan keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan. Sebagai inovator pemerintah desa harus menjadi sumber dari hal-hal baru metode atau program, sistem ataupun cara berpikir.

III. METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Studi literatur ini menggunakan pendekatan *scoping review* dengan menggunakan metode *Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses* atau biasa disebut PRISMA, metode ini dilakukan untuk mengidentifikasi langkah-langkah menyusun protokol penelitian. Desain penelitian *scoping review* dipilih karena sumber referensi yang peneliti gunakan bervariasi berasal dari berbagai artikel. *Scoping review* yaitu penelitian yang bertujuan untuk memetakan literatur dalam hal volume, sifat dan karakteristik, meringkas dan menyebarluaskan temuan penelitian, serta mengidentifikasi kesenjangan penelitian yang ada (Arksey dan O'Malley, 2005). *Scoping review* bertujuan untuk menjawab pertanyaan dari topik penelitian yang telah ditentukan dengan menggunakan berbagai sumber artikel penelitian serupa lalu dikelompokkan dan membuat kesimpulan. *Scoping review* dapat digunakan untuk mengidentifikasi area topik untuk tinjauan sistematis di masa mendatang. Tinjauan sistematis, di sisi lain, digunakan untuk menjawab pertanyaan yang lebih spesifik, berdasarkan kriteria minat tertentu (yaitu populasi, intervensi, hasil, dll.), *scoping* dapat dilihat sebagai latihan yang menghasilkan hipotesis (Tricco *et al.*, 2016). Dalam penelitian *literature review* peneliti melakukan sintesis tematik yang disusun dari hasil penelitian terdahulu agar dapat digunakan oleh pembaca untuk mendapatkan ringkasan teori dan temuan-temuan empiris terkait dengan topik yang diteliti (Cisco, 2014).

3.2 Kriteria Kelayakan (*Eglibility Criteria*)

Penelitian ini menggunakan jenis *papers* yang memiliki beberapa kriteria, yakni:

- 1) Semua penelitian partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur desa yang menggunakan pendekatan kualitatif metode deskriptif;
- 2) Informasi singkat yang menjelaskan bentuk-bentuk, jenis-jenis, tahapan-tahapan dan faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur desa serta peran pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pembangunan infrastruktur desa;
- 3) Pedoman untuk menginformasikan penelitian partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur desa (yang dapat mencakup latar belakang masalah, teori yang digunakan dalam penelitian, hasil penelitian yang akurat dan di peroleh dengan menggunakan metode eksplisit); dan,
- 4) Studi yang menilai kualitas penelitian dalam penelitian partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur desa. Hal ini bertujuan untuk memetakan dengan cepat konsep-konsep kunci yang mendasari penelitian dan sumber utama serta jenis bukti yang tersedia, dan dapat digunakan untuk mengidentifikasi berbagai persoalan yang menyakut konsep secara komprehensif.

Menurut Levac, Colquhoun, and O'Brien dalam Tricco *et al.*, (2016) tahapan-tahapan dalam *scoping review*, yaitu:

- 1) Mengidentifikasi pertanyaan penelitian dengan mengklarifikasi dan menghubungkan tujuan dan pertanyaan penelitian,
- 2) Mengidentifikasi studi yang relevan dengan menyeimbangkan kelayakan dengan keluasan dan kelengkapan,
- 3) Seleksi literatur menggunakan pendekatan *iterative* untuk mempelajari pemilihan dan data ekstraksi yang menyesuaikan dengan topik penelitian,

- 4) Bagan data yang menggabungkan ringkasan karakteristik studi dan analisis tematik kualitatif,
- 5) Menyusun, meringkas dan melaporkan hasil analisis literatur, dan
- 6) Konsultasi kepada pihak kompeten, yang merupakan langkah opsional dan dapat diadopsi sebagai komponen wajib dari *scoping review*.

3.3 Strategi Pencarian *Literature*

3.3.1 Database Pencarian

Literature review ini merupakan rangkuman menyeluruh beberapa studi penelitian yang ditentukan berdasarkan tema mengenai partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur desa. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang tidak diperoleh dari pengamatan langsung, namun diperoleh dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti- peneliti sebelumnya. Sumber data sekunder yang didapatkan berupa artikel ilmiah bereputasi nasional berbahasa Indonesia dengan tema mengenai partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur desa. Pencarian literatur dalam *literature review* ini menggunakan database yaitu *google scholar*, *onesearch.id* dan *neliti.com*.

3.3.2 Kata Kunci yang Digunakan

Pencarian artikel menggunakan *keyword* berikut: bentuk-bentuk partisipasi masyarakat, jenis-jenis partisipasi masyarakat, tahapan dalam partisipasi masyarakat, faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat, peran pemerintah desa, pembangunan, dan infrastruktur desa.

3.4 Kriteria Inklusi dan Eksklusi

Kriteria inklusi merupakan penjelasan dari faktor yang dipilih penulis untuk memasukkan artikel untuk dilakukan *review*. Sedangkan kriteria eksklusi merupakan penjelasan faktor penulis untuk memutuskan bahwa artikel dalam pencarian tidak termasuk dalam artikel yang akan direview (Ulhad, dkk. 2020).

Kriteria artikel yang akan direview adalah artikel penelitian tentang partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur desa. Artikel penelitian yang ditemukan sesuai dengan kata kunci selanjutnya dilakukan *skrining*, dilihat abstrak, kemudian dibaca artikel *full text*. Artikel yang sesuai dengan kriteria inklusi dan terdapat tema partisipasi masyarakat, pembangunan, dan infrastruktur desa dan selanjutnya dilakukan *review*. Kriteria artikel yang terpilih untuk *review* adalah artikel yang didalamnya mengandung tema partisipasi masyarakat, pembangunan, dan infrastruktur desa.

Strategi yang digunakan mencari artikel menggunakan *framework* PICOS

- a. *Population/problem*, populasi atau masalah yang akan dilakukan analisis dalam karya ilmiah
- b. *Intervention*, tindakan yang dilakukan terhadap sebuah masalah
- c. *Comparison*, pembandingan dari penatalaksanaan yang lain
- d. *Outcome*, hasil dari penelitian
- e. *Study desain*, desain penelitian yang akan digunakan untuk mereview

Penelitian ini menggunakan PICOS *framework* dengan tema partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur desa dengan format sebagai berikut:

Tabel 2. Format PICO(S) dalam perumusan kriteria inklusi dan eksklusi.

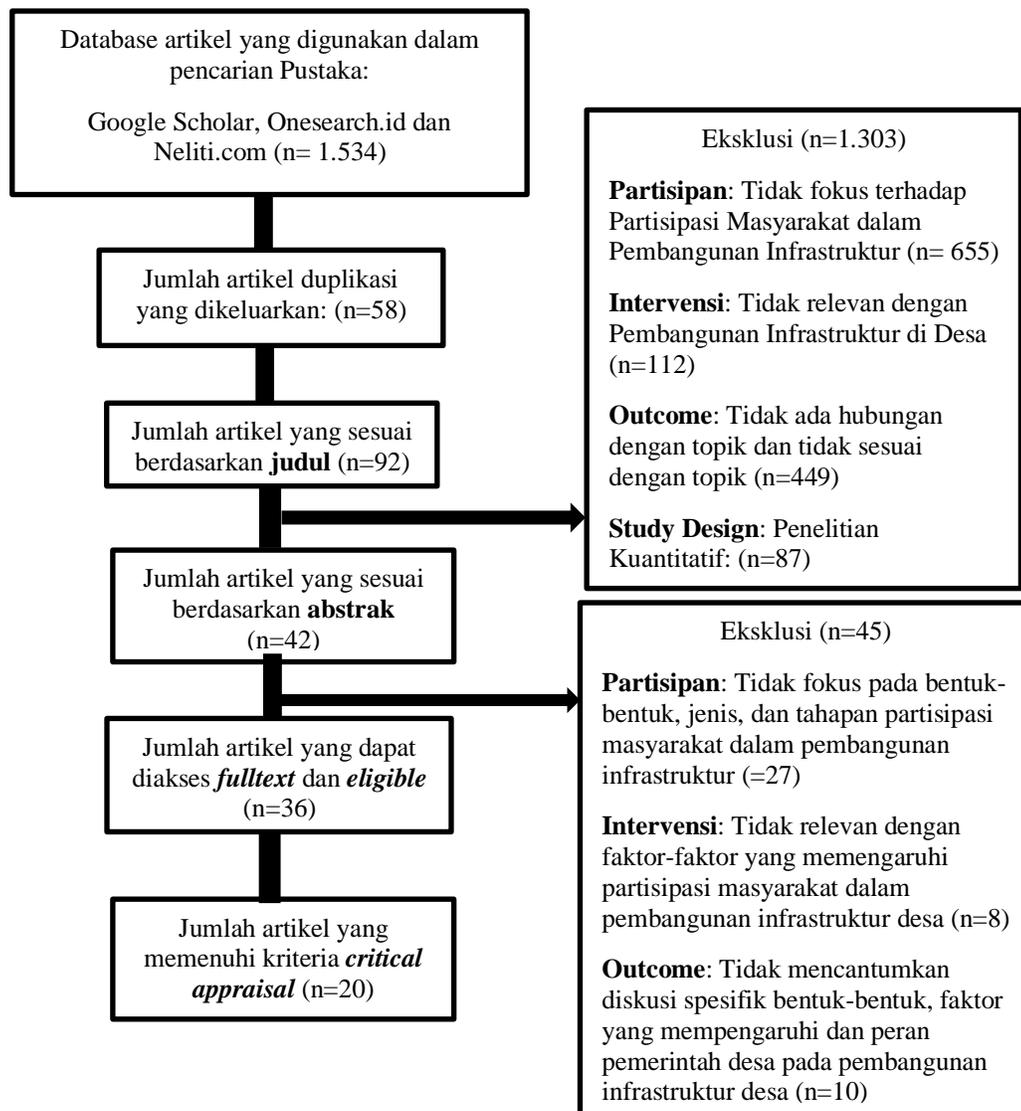
No	Kriteria	Inklusi	Eksklusi
1	Population/Problem	Partisipasi Masyarakat	Bukan Partisipasi Masyarakat
2	Intervention/Indicators	Pembangunan Infrastruktur	Selain pembangunan infrastruktur
3	Comparation	Desa	Selain Desa
4	Outcome	Bentuk-bentuk, jenis-jenis, tahapan, faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat, peran pemerintah desa.	Selain bentuk-bentuk, jenis-jenis, tahapan, faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat, peran pemerintah desa.
5	Study Desain	Kualitatif	Kuantitatif
6	Publication years	Setelah tahun 2015	Sebelum tahun 2015
7	Language	Bahasa Indonesia	Selain bahasa Indonesia

(Sumber: diolah oleh peneliti, 2021)

PRISMA *Flowchart* digunakan untuk menggambarkan secara detail dan transparan proses identifikasi literatur PRISMA. PRISMA merupakan *Preferred Reporting Items for Systemtic Review and Meta-Analyses*, dikembangkan untuk membantu penulis dalam melaporkan seleksi literatur. PRISMA dinilai tepat digunakan, karena dalam penggunaannya dapat meningkatkan kualitas pelaporan publikasi (Peters *et al.*, 2015).

Adapun *keywords* yang digunakan dalam pencarian artikel yaitu “Partisipasi masyarakat” dan “Pembangunan” dan “Infrastruktur” dan “Desa” dan semua artikel yang berkaitan dengan “Partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur desa”. *Keywords* ini digunakan untuk mencari artikel, jurnal, dan skripsi yang berkaitan dengan pembahasan peneliti dan kemudian di seleksi menggunakan PRISMA *Flowchart*. Dalam PRISMA *Flowchart* mencantumkan detail jumlah literatur yang diidentifikasi dari hasil pencarian, proses

penyaringan, jumlah penelitian yang memenuhi kriteria kelayakan, dan jumlah penelitian yang akan diikutsertakan untuk tinjauan menyeluruh sehingga akan memperoleh hasil penelitian yang berkualitas. Berdasarkan dari kriteria inklusi, artikel yang diidentifikasi pada awal pencarian dalam artikel ini adalah sebanyak 1.534 artikel yang dipublikasi di *google scholar*, *onesearch.id* dan *neliti.com*. Artikel tersebut selanjutnya disaring untuk melihat artikel yang duplikasi dan dikeluarkan (n=58), selanjutnya dilakukan eksklusi artikel yang tidak relevan sesuai topik (n=1.303), kemudian dilanjutkan eksklusi artikel yang tidak sesuai dengan judul, abstrak, tidak *fulltext* dan tidak layak *di-review* (=45). Berdasarkan kriteria inklusi sehingga jumlah total akhir artikel yang memenuhi syarat ***critical appraisal*** dan layak untuk *review* adalah 20 artikel, seperti yang digambarkan pada bagan berikut ini:



Gambar 1 Diagram PRISMA Flowchart
(Sumber: hasil penelitian, 2021)

3.5 Cara Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang berupa hasil penelitian terdahulu terkait tentang partisipasi masyarakat, pembangunan, dan infrastruktur desa, yang didapatkan melalui penelusuran artikel ilmiah nasional secara online. Strategi pencarian sistematis dilakukan berdasar strategi pencarian online berbahasa Indonesia yang dipilih dari *google scholar*, *onesearch.id* dan *neliti.com*.

Studi yang memenuhi kriteria inklusi akan di evaluasi kritis menggunakan Peneliti melakukan pengkajian menggunakan desain penelitian kualitatif, *critical appraisal* pada literatur yang telah dieliminasi dari kriteria inklusi. Pengkajian kualitas studi menggunakan *critical appraisal checklist for qualitative research* panduan *Joanna Briggs Institute Appraisal Tools*. Kualitas metodologi akan dinilai dengan sedang jika memenuhi kriteria 6–8 dan kriteria tinggi 9–10 dari daftar periksa *critical appraisal*. Untuk memungkinkan ulangan oleh orang lain atau duplikasi, tingkatkan keandalan temuan dan akurasi metodologis ini akan didokumentasikan menggunakan Item Pelaporan Pilihan untuk Tinjauan Sistematis dan Analisis Meta (PRISMA) (Stenberg et al, 2018).

3.6 Metode Analisis Data

Artikel penelitian yang sesuai dengan kriteria inklusi kemudian dikumpulkan dan dibuat ringkasan artikel meliputi nama peneliti, tahun terbit, tujuan penelitian, desain penelitian, pengumpulan data, ringkasan hasil penelitian, dan kesimpulan. Ringkasan artikel penelitian tersebut dimasukan ke dalam tabel diurutkan sesuai tahun terbit artikel.

Analisis didasarkan dari pencermatan abstrak dan *full text* artikel. Ringkasan artikel tersebut kemudian dilakukan analisis terhadap isi yang terdapat dalam tujuan penelitian, metode, hasil dan kesimpulan penelitian. Temuan akan disajikan di bawah judul tematik menggunakan tabel ringkasan yang dapat menginformasikan deskripsi poin-poin penting. Selanjutnya, tabel rinci akan menyajikan: penulis, distribusi geografis studi, tahun publikasi, intervensi disajikan, teori yang digunakan pada studi, pengalaman yang dilaporkan, hasil dan temuan utama dan metodologi penelitian (Stenberg *et al*, 2018).

3.7 Konsultasi

Konsultasi adalah tahap opsional dalam *scoping review* namun, karena itu menambah ketelitian metodologis itu akan digunakan peneliti. Konsultasi akan dilakukan ketika hasil awal disusun dalam bagan dan tabel pada *scoping review*. Pemangku kepentingan dari penelitian ini ialah dosen pembimbing peneliti akan diberikan gambaran umum tentang hasil awal. Tujuan konsultasi adalah untuk meningkatkan validitas hasil studi.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan kriteria inklusi hasil *review* dari 20 artikel dengan pencarian proses seleksi literatur digambarkan dalam bentuk diagram *Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses* (PRISMA) *flowchart* mengenai partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur desa disimpulkan bahwa:

1. Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur desa sangat didominasi oleh teori bentuk-bentuk partisipasi menurut Cohen dan Uphoff meliputi partisipasi dalam pengambilan keputusan (perencanaan), partisipasi dalam pelaksanaan, partisipasi dalam pengambilan manfaat dan partisipasi dalam evaluasi (pengawasan). Sedangkan peneliti lain menggunakan teori bentuk-bentuk partisipasi menurut para ahli lainnya yang dalam hal ini dikatakan kurang mendominasi dalam penelitian yang dilakukan. Partisipasi dalam pengambilan keputusan (perencanaan) dan partisipasi dalam pelaksanaan sangat mendominasi pada proses pembangunan. Penelitian sangat mendominasi dilakukan pada tahun 2017, 2019 dan 2021, sangat didominasi dilakukan diwilayah Kalimantan dengan latar belakang peneliti didominasi oleh Dosen dan Mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Negara dan Publik.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur desa sangat didominasi oleh faktor kesadaran masyarakat, faktor pendidikan, faktor pekerjaan (ekonomi), fasilitas sarana teknologi dan komunikasi dan kepemimpinan pemerintah desa cukup mendominasi, sedangkan faktor-faktor lain seperti adanya dana desa, kesempatan untuk berpartisipasi dan sumber daya manusia yang kurang memadai kurang mendominasi. Penelitian sangat mendominasi dilakukan pada tahun 2019, sangat didominasi dilakukan diwilayah Kalimantan dengan latar belakang

peneliti didominasi oleh Dosen dan Mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Negara.

3. Peran pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur desa sangat didominasi oleh peran pemerintah desa sebagai motivator, sedangkan peran pemerintah desa sebagai fasilitator, mobilisator, inovator dan peran lainnya dikatakan kurang mendominasi. Penelitian cukup mendominasi dilakukan pada tahun 2016, 2020 dan 2021, sangat didominasi dilakukan di wilayah Sulawesi dengan latar belakang peneliti didominasi oleh Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil *review* maka dapat dikemukakan saran sebagai berikut:

1. Untuk lebih memaksimalkan temuan yang lebih luas mengenai partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur desa, sebaiknya dapat menggunakan konsep dan teori yang berbeda seperti tingkat partisipasi menggunakan tangga partisipasi menurut Arnstein, tingkatan partisipasi menurut Peter Oakley, Kanji dan Greenwood atau Vene Klasen dan Miller.
2. Peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian mengenai partisipasi masyarakat dalam pembangunan menggunakan jenis *literature review* yang lain, menggunakan database yang lebih banyak sehingga hasil yang diperoleh lebih akurat dan informasi menjadi lebih lengkap.
3. Bagi penelitian selanjutnya, bisa meneliti lebih lanjut mengenai strategi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur desa melalui *literature review*.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, M., & Rahaju, T. (2016). Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Desa Melalui Musrenbang (Studi Kasus Pada Pembangunan Japordes Desa Tunggunjagir Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan). *Publika*, 4(1).
- Aletha, B. (2019). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Bulangkulon Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik (Studi Kasus Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Desa Bulangkulon) (*Doctoral Dissertation, Universitas Wijaya Putra*).
- Alfis, A., Sahibo, S. A., & Fery, F. (2019). Partisipasi Masyarakat Dalam pembangunan Infrastruktur Di Desa tanjung Padang Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 1(1).
- Arksey, H., & O' Malley, L. (2005). Scopingstudies: towards a methodological framework: *International Journal of Social Research Methodology: Theory and Practice* 8 (01):19-32DOI:10
- Baru, D. D. N. (2015). Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Di Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Malinau (Studi Komparatif Antara Desa Long Nawang).
- Budiman, A., & Sugianor. (2018). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Pada Desa Pandamaan Kecamatan Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik & Bisnis*, 2(2), 208–217.
- Cisco, J. (2014). Teaching the literature review: A practical approach for collegein structors. *Teaching & Learning Inquiry. The International Society of the Scholarship of Teaching and Learning*, 2(2), 41–57.
- Darmawansyah, R., Syapsan, S., & Tampubolon, D. (2021). Penggunaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Teluk Nilap Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau. *Bussman Journal: Indonesian Journal Of Business And Management*, 1(3), 511-530.
- Dewi, L. K., Triono, B., & Dewi, D. S. K. (2020). Partisipasi Masyarakat dalam Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP). *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, 1(1), 45-60.

- Dwijosusilo, K., & Shafiyah, S. (2020). Partisipasi Masyarakat Dalam Pemanfaatan Dana Desa untuk Pembangunan Infrastruktur di Desa Klobur Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang. *Jurnal ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial*, 2(2), 143-156.
- Gani, R., Djafar, L., & Paramata, S. H. (2016). Peranan Pemerintah Desa untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Desa Dulamayo Utara Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 5(1), 60–68.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jisep/article/view/17130/16677>
- Gedeona, H. T. (2010). Pandangan Ilmu Administrasi Publik Mengenai Signifikansi Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi*, 7(4), 07
- Hakim, Arif, R., Surya, I., & Hasana, N. (2018). Peran Kepala Desa Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Makmur Jaya Kecamatan Kongbeng Ka Bupaten Kutai Timur. *Ilmu Pemerintahan*, 6(3), 1111–1124.
- Halawa, E., Bali, P., & Agung, U. D. (2020). MASYARAKAT PADA PEMBANGUNAN DESA LOLOWONU NIKO ' OTANO Oleh : *E-mail* : 5, 76–83.
- Hardianti, S., Muhammad, H., & Lutfi, M. (2017). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa (Program Alokasi Dana Desa Di Desa Buntongi Kecamatan Ampana Kota). *E Jurnal Katalogis*, 5(1), 120–126.
- Hastuty, N. D. W. I. (2021). PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN (Studi Di Desa Muaro Pijoan Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi). *Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi*
- Hayati, N. (2017). Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Senyuir Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur. In *Administrasi Negara*. ejournal.ap.fisip-unmul.ac.id.
[https://ejournal.ap.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2017/02/JURNAL\(02-13-17-04-19-07\).pdf](https://ejournal.ap.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2017/02/JURNAL(02-13-17-04-19-07).pdf)
- Hermansyah, A. (2018). Pembangunan Infrastruktur dan Partisipasi Masyarakat. <https://news.detik.com/kolom/d-4021236/pembangunan-infrastruktur-dan-partisipasi-masyarakat> diakses pada tanggal 18 Juni 2021.
- Ismatullah, I., & Mahendra, G. K. (2021). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Desa Kaligintung Kecamatan Temon Kabupaten Kulon

Progo 2019. *Journal of Social Politics and*
<https://jurnal.amikom.ac.id/index.php/jspg/article/view/556>

Laksana, N. S. (2013). Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat desa dalam program desa siaga di Desa Bandung Kecamatan Playen Kabupaten Gunung Kidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal kebijakan dan manajemen publik*, 1(1).

Latif, A., Irwan, I., Rusdi, M., Mustanir, A., & Sutrisno, M. (2019). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Timoreng Panua Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 5(1), 1-15.

Masterplandes. (2020). Pembangunan Infrastruktur berbasis Partisipasi Masyarakat. <https://www.masterplandes.com/infrastruktur/pembangunan-infrastruktur-berbasis-partisipasi-masyarakat/> diakses pada tanggal 18 Juni 2021.

Marlita, V. S., & Widodo, S. (2020). Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Sidorejo Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk. *Jurnal Mediasosian : Jurnal Ilmu Sosial Dan Administrasi Negara*, 4(2), 159–171. <https://doi.org/10.30737/mediasosian.v4i2.1200>.

Maulana, S. (2019). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Desa Wisata Kaki Langit Di Desa Mangunan Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta.

Memah, M. Y., & Sendow, M. M. (2019). Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Infrastruktur Jalan Pertanian Melalui Dana Desa Di Desa Buhias Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara. *Agri-Sosioekonomi*, 15(3), 417-424.

Munawir, A. (2019). Peran Pemerintah Desa Terhadap Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan (Studi Kasus Desa Maliaya Kecamatan Malunda Kabupaten Majene). *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 287.

Ningtyias, F. W. (2020). Panduan Literatur Review Untuk Skripsi. Jember: Universitas Jember Fakultas Kesehatan Masyarakat. <http://fkm.unej.ac.id/panduan-literature-review-2020/>

Nur, F. (2019). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Tungke Kecamatan Bengo Kabupaten Bone. repository.unibos.ac.id. <https://repository.unibos.ac.id/xmlui/handle/123456789/80>

Peters, M.D.J., Godfrey, C.M., Khalil, H., McInerney, P., Parker, D., Soares, C.B., (2015). Guidance for conducting systematic scoping reviews: *International*

- Pham, M. T., Rajić, A., Greig, J. D., Sargeant, J. M., Papadopoulos, A., & McEwen, S. A. (2014). A scoping review of scoping reviews: advancing the approach and enhancing the consistency. *Research synthesis methods*, 5(4), 371-385.
- Putra, O. K. Y. F. (2019). Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Prasarana Jalan Di Desa Pendingin Kecamatan Sanga-Sanga. *eJournal Ilmu Sosiatri-Sosiologi*, 7(3), 81–92.
- Rahma, V. A., & Niswah, F. (2020). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Melalui Program Lamongan Green and Clean Di Desa Surabaya Kecamatan *Publika*, 8(5).
- Rahman, A., & Rosmita, R. (2019). Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Infrastruktur Di Desa Gemilang Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir. *Jurnal Riset Mahasiswa Dakwah dan Komunikasi*, 1(2), 57-75.
- Rahayu, M. D. (2018). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Sinarsari Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah. (Diakses di digilib.unila.ac.id pada tanggal 2 Desember 2020).
- Rares, J. J., Si, M., Ruru, J. M., & Si, M. (2017). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Tolombukan Satu Kecamatan Pasan Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Administrasi Publik UNSRAT*, 3(046).
- Relidiansyah, R., Susanto, T. A., & Hapsari, D. (2019). Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Program Kampung Keluarga Berencana (KB) Di Desa Tanjung Seteko Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir. (*Doctoral Dissertation, Sriwijaya University*).
- Sangian, D., Dengo, S., & Pombengi, J. (2018). Pendekatan Partisipatif Dalam Pembangunan Di Desa Tawaang Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Administrasi Publik*, 4(56).
- Simanullang, T. S. (2019). Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Rt 03 Jalan Poros Kebon Agung Kelurahan Lempake. *EJournal Sosiatri-Sosiologi*, 7(4), 219–230.
- Sindonews. (2021). Membangun Desa melalui Dana Desa. <https://www.google.com/amp/s/nasional.sindonews.com/newsread/350788/1/membangun-desa-melalui-dana-desa-1614596584> diakses pada tanggal 18 Juni 2021.

- Sirait, N. C. (2021). Peran Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Guna Meningkatkan Pembangunan Desa.
- Solin, S., Tamrin, T., & Azmi, A. (2021). Upaya Pemerintah Desa Dalam Mendorong Masyarakat Untuk Pembangunan Desa. *AL-SULTHANIYAH: Jurnal Ilmu ...*, 1, 50–59. <http://journal.iaisambas.ac.id/index.php/al-sulthaniyah/article/view/386>
- Sulistiyorini, dkk. (2016). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Di Lingkungan Margaluyu Kelurahan Cicurug. (Diakses di jurnal.unpad.ac.id pada tanggal 2 Desember 2020)
- Stenberg M, Mangrio E, Bengtsson M, et al. (2018). Formative peer assessment in healthcare education programmes: protocol for a scoping review. *BMJ Open* 2018;8:e025055. doi:10.1136/bmjopen-2018-025055.
- Tricco, A. C., Lillie, E., Zarin, W., O'Brien, K., Colquhoun, H., Kastner, M., ... & Straus, S. E. (2016). A scoping review on the conduct and reporting of scoping reviews. *BMC medical research methodology*, 16(1), 1-10.
- Tumbel, S. M. (2017). Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa di desa Tumulung Satu kecamatan Tareran kabupaten Minahasa Selatan. *Politico: Jurnal Ilmu Politik*, 6(1), 161029.
- Ulhad, Z. S., Biomed, M. & Rahmayanti, Mayu. (2020). Panduan Penulisan Skripsi Literatur Review. *Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim*
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Yeni, A., & Tinov, M. T. (2018). Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Infrastruktur Kampung Tengah (Studi Aloaksi Dana Desa di Kampung Tengah Kecamatan Mempura Kabupaten Siak Tahun 2016). (*Doctoral dissertation, Riau University*).